

RINGKASAN

Rizka Maulida 220510073 Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Isteri Dokter Di Lhokseumawe (Studi Kasus Nomor: 12/Pid.B/2025/PN Lsm) (Prof. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum dan Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*), proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan aparat penegak hukum. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan (*das sein*), pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Kasus pembunuhan istri dokter di Lhokseumawe yang diputus melalui Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Lsm menjadi salah satu perkara yang menarik perhatian masyarakat sehingga perlu dikaji efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Lhokseumawe dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan fakta yang ditemukan di lapangan (*das sein*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*), proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan telah diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangannya. Berdasarkan fakta di lapangan (*das sein*), tahapan penanganan perkara telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan karena masih terdapat beberapa kendala dalam proses penanganan perkara. Kedua, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum meliputi perbedaan pandangan antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengenai penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP, keterbatasan alat bukti pada tahap awal penyidikan, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum yang belum optimal. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain meningkatkan koordinasi antar penegak hukum, memperkuat proses pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah, serta meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Saran penelitian ini yaitu agar Kepolisian dan Kejaksaan dapat meningkatkan koordinasi serta kesamaan pendapat dalam setiap tahapan penanganan perkara hal dapat memperkuat proses pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah, serta meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pembunuhan, Penyidikan.

SUMMARY

Rizka Maulida *The Effectiveness of Law Enforcement in the Murder*
220510073 *Case of a Doctor's Wife in Lhokseumawe (Case Study*
 Number: 12/Pid.B/2025/PN Lsm)
 (Prof. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum dan Dr. Joelman
 Subaidi, S.H., M.H.)

Law enforcement against the crime of murder is one effort to realize legal certainty, justice, and the benefit of law in social life. Based on applicable legal provisions (*das sollen*), the process of investigation, inquiry, prosecution, and trial must be carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP), the Criminal Code (KUHP), and laws and regulations governing the authority of law enforcement officers. However, based on the results of field research (*das sein*), the implementation of law enforcement does not always proceed without obstacles. The case of the murder of a doctor's wife in Lhokseumawe, which was decided through Decision Number 12/Pid.B/2025/PN Lsm, is one of the cases that has attracted public attention, so it is necessary to study the effectiveness of its law enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement, identify obstacles faced by law enforcement officers, and analyze efforts made to overcome these obstacles..

This research is an empirical legal research with a case approach and a statute approach that is descriptive analytical. Primary data was obtained through interviews with investigators from the Criminal Investigation Unit of the Lhokseumawe Police and Public Prosecutors from the Lhokseumawe District Attorney's Office. Secondary data was obtained through a literature review of relevant laws and regulations, court decisions, books, journals, and other literature. The data obtained were analyzed qualitatively by comparing the applicable legal provisions (*das sollen*) with the facts found in the field (*das sein*).

The research results show that, first, based on applicable legal provisions (*das sollen*), the processes of inquiry, investigation, prosecution, and trial have been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) and other laws and regulations. Based on the facts on the ground (*das sein*), the stages of case handling have been carried out by law enforcement officers in accordance with applicable procedures. However, the effectiveness of their implementation still needs to be optimized because several obstacles remain in the case handling process. Second, obstacles faced by law enforcement officers include differences of opinion between investigators and Public Prosecutors regarding the application of Article 338 of the Criminal Code and Article 340 of the Criminal Code, limited evidence in the early stages of the investigation, and suboptimal coordination between law enforcement agencies. Third, efforts made to overcome these obstacles include improving coordination between law enforcement officers, strengthening the evidentiary process based on valid evidence, and increasing the professionalism of law enforcement officers in every stage of case handling.

The suggestion of this research is that the Police and the Prosecutor's Office can improve coordination and have a common opinion in every stage of case handling, this can strengthen the process of proof based on valid evidence,

and increase the professionalism of law enforcement officers so that law enforcement can be carried out more effectively, provide legal certainty, realize justice, and provide benefits to the community.

Keywords : *Effectiveness, Law Enforcement, Murder, Investigation.*